

LKjIP

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

☎ (021) 8754528 - 8754529

✉ tu.setda@bogorkab.go.id

🌐 www.setda.bogorkab.go.id

KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai penvusun kebijakan dan penoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Laporan kinerja instansi pemerintah ini juga merupakan alat pengendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

Melalui laporan ini, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini, diharapkan adanya optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan demi mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Cibinong, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a checkmark-like flourish.

Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196404181985031015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKjIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian Sekretariat Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) tujuan yang didukung oleh 1 (satu) sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Tujuan yaitu “Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas”

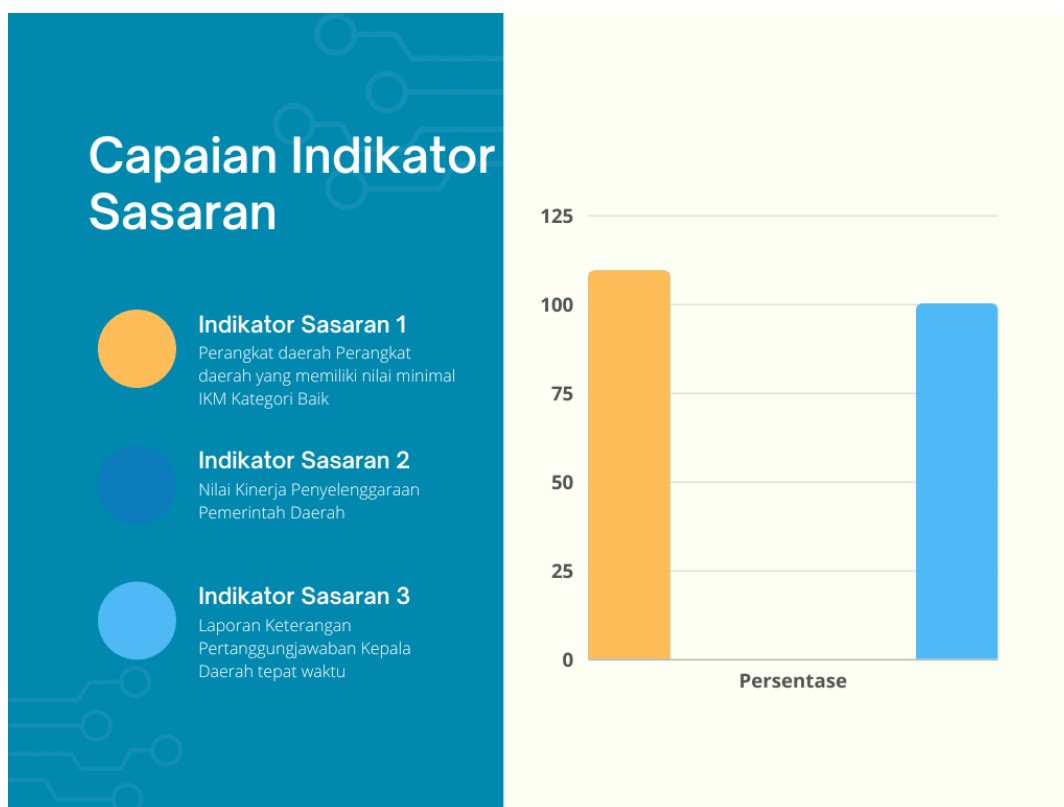
Sasaran : “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yangt baik bersih dan efektif”

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah rata-rata tercapai sebesar **104,75%** dengan kategori sangat memuaskan. Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Indikator sasaran Perangkat daerah Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik dengan capaian nilai kinerja sebesar 109,49%;

2. Indikator sasaran Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum ada penilaian dari Kemendagri sehingga tidak ada pengkategorian capaian kinerja; dan
3. Indikator sasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu mendapat kategori memuaskan dengan capaian nilai kinerja sebesar 100%.

Gambar 1.1
Diagram Realisasi Masing – Masing Indikator Sasaran



Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa beberapa program telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian output sesuai dengan

rencananya atau lebih. Dari anggaran belanja daerah yang tersedia sebesar Rp 150.910.547.513,- terealisasi Rp 141.096.374.066,- atau 93,50%.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2022 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh perangkat daerah maupun badan layanan umum daerah serta komitmen dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai IKM perangkat daerah di Kabupaten Bogor;
2. Melakukan peningkatan kualitas SDM dan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal untuk dapat meningkatkan Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor;
3. Menjadwalkan penyusunan LKPJ Bupati yang terencana dan meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan data pendukung sehingga dapat mempertahankan penyampaian LKPJ Bupati yang tepat waktu;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan selama masa pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Daftar Isi

	Halaman:
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii-iv
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	3
C. Aspek Strategis yang berpengaruh	15
D. Dasar Hukum	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 -2023	17
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Kinerja	24
BAB IV PENUTUP	41
Diagram :	
Diagram 1.1 Alur Pikir Pengukuran kinerja	2
Diagram 1.2 Struktur Organisasi Setda kabupaten Bogor	9
Diagram 1.3 Persentase Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	11
Diagram 1.4 Persentase Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang	13
Diagram 1.5 Persentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Diagram 3.1 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	33
Diagram 3.2 Komposisi Belanja Daerah Sekretariat Daerah	33
Realisasi Belanja Daerah Sekretariat Daerah	34

Diagram 3.4	Komposisi Belanja Operasi	34
Diagram 3.5	Realisasi Belanja Operasi	35
Diagram 3.6	Komposisi Belanja Modal	35
Diagram 3.7	Realisasi Belanja Modal	36
Tabel	:	
Tabel 1.1	Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 1.2	Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang	12
Tabel. 1.3	Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 2.1	Tabel Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2022	18
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021	23
Tabel. 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022	25
Tabel 3.4	Nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM	26
Tabel 3.5	Tahapan dan Uraian Kegiatan Review LPPD	29
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan 2022	30
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022	32
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Masing – Masing Program dan Kegiatan Tahun 2022	36
Lampiran	:	
Lampiran 1	Perubahan Perjanjian Kinerja (Jankin) Tahun 2022	44
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022	45
Lampiran 3	Hasil SKM	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat yang menginginkan terwujudnya *good governance* dengan ditandai kinerja pemerintah yang ekonomis, efisien dan efektif.

Setiap aparatur pemerintah daerah dituntut harus mampu memahami tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel sehingga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya merupakan strategi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

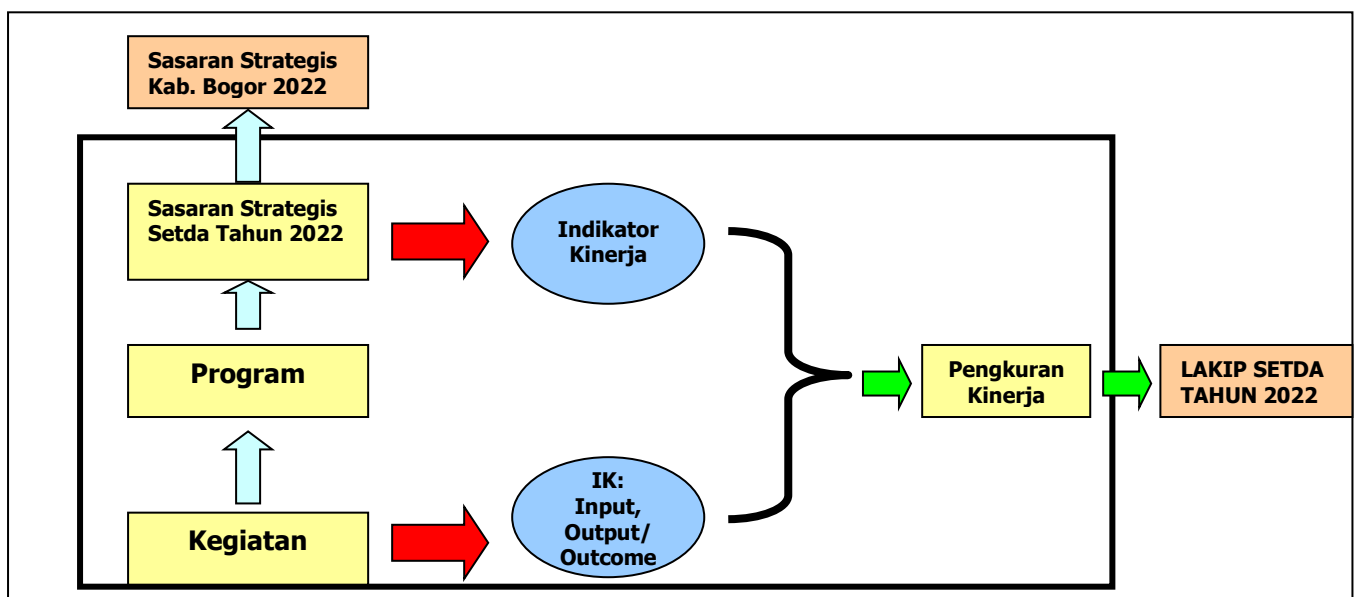
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2021 kepada Bupati Bogor, Sekretariat Daerah menyusun Laporan Kinerja tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun

2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Daerah pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian Sekretariat Daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022. Gambaran pengukuran kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja



B. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka di bentuklah Sekretariat Daerah. Pembentukan Sekretariat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum, serta 3 (tiga) orang Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional, serta 12 (dua belas) Bagian, 31 (tiga puluh satu) Kelompok Substansi dan 5 (lima) Sub Bagian.

1. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi dan Kelembagaan

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. **Sekretaris Daerah;**
- b. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan
- b) Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan
- c) Kelompok Substansi Otonomi Daerah

2) Bagian Perundang – undangan

Bagian Perundang – undangan terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
- b) Kelompok Substansi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
- c) Kelompok Substansi Kajian Dokumentasi dan Informasi

3) Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum

Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Kerjasama
- b) Kelompok Substansi Litigasi
- c) Kelompok Substansi Non Litigasi

4) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual
- b) Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial
- c) Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

1) Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum daerah
- b) Kelompok Substansi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- c) Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan Pembangunan, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Penyusunan Program
 - b) Kelompok Substansi Pengendalian Program
 - c) Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:

- a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa
 - b) Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - c) Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 4) Bagian Sumber Daya Alam
- Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas:
- a) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - b) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c) Kelompok Substansi Sumber Daya Alam Energi dan Air

d. Asisten Administrasi Umum,

Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1) Bagian Umum

Bagian Umum, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Perlengkapan
- c) Sub Bagian Rumah Tangga

2) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- b) Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- c) Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:

- a) Kelompok Substansi Perencanaan
- b) Kelompok Substansi Keuangan
- c) Kelompok Substansi Pelaporan
- 4) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan
 - c) Kelompok Substansi Dokumentasi Pimpinan

e. Staf Ahli Bupati

- 1) Staf Ahli bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 3) Staf Ahli bidang Administrasi dan Keuangan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas unsur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan, hukum dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, produk hukum, bantuan hukum dan kerjasama daerah serta kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;

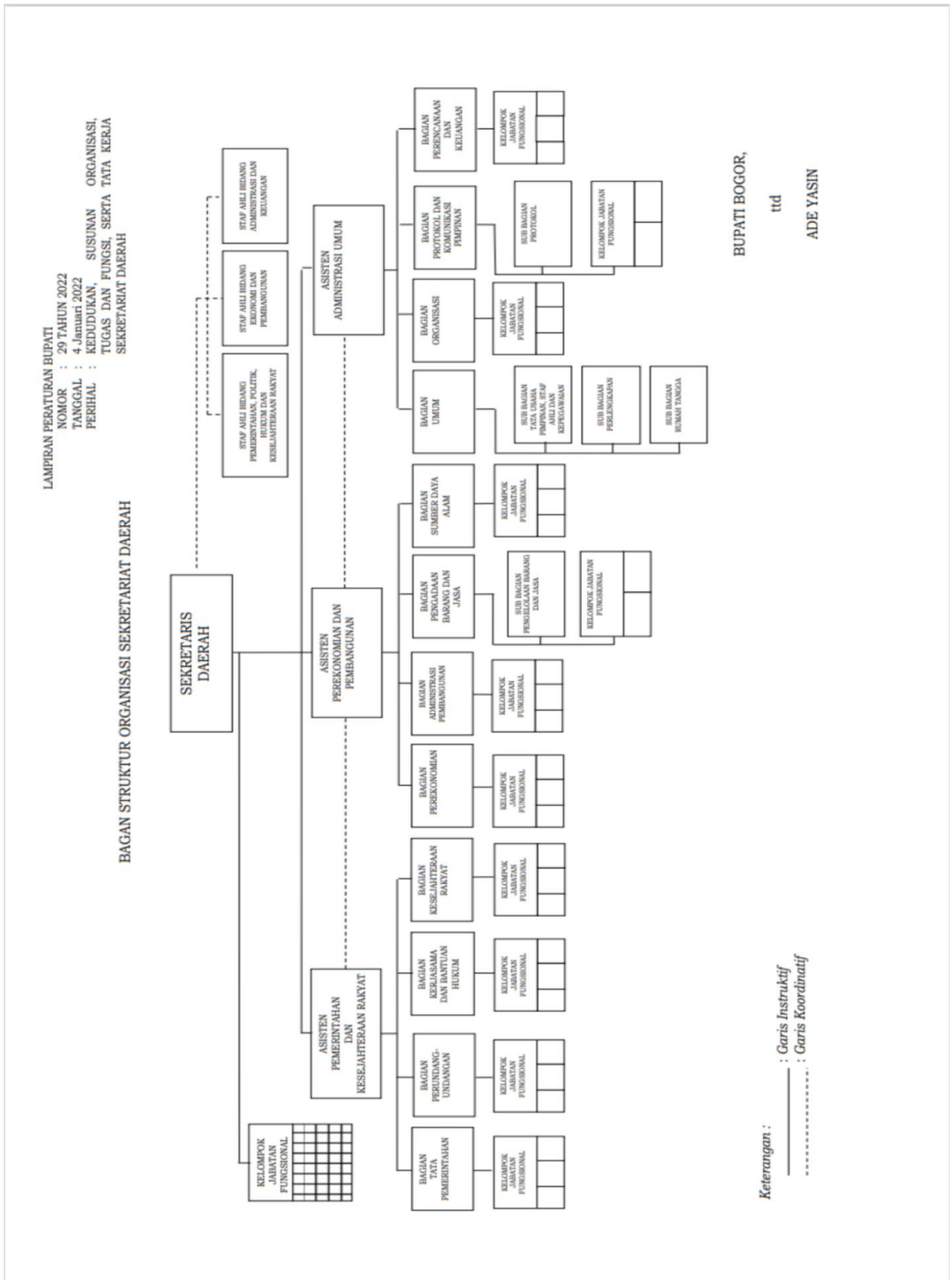
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mulai dari Sekretaris Daerah sampai dengan Bagian-Bagian yang ada di masing-masing Asisten sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah digambarkan dalam Diagram 1.1.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Setda kabupaten Bogor (Sesuai Perbup No. 29 Tahun 2022)



4. Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 256 orang PNS. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa pegawai dengan pendidikan S3 berjumlah 2 orang (0,78%) pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 57 orang (22,27%), pegawai dengan pendidikan S1 berjumlah 106 orang (41,41%), pegawai berpendidikan Sarjana Muda dan Diploma III berjumlah 16 orang (6,25%), pegawai dengan pendidikan SLTA berjumlah 69 orang (26,95%), pegawai dengan pendidikan SLTP berjumlah 5 orang (1,95%) dan pegawai dengan pendidikan SD berjumlah 1 orang (0,39%)

Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2022 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 dan diagram 1.1 berikut:

Tabel. 1.1

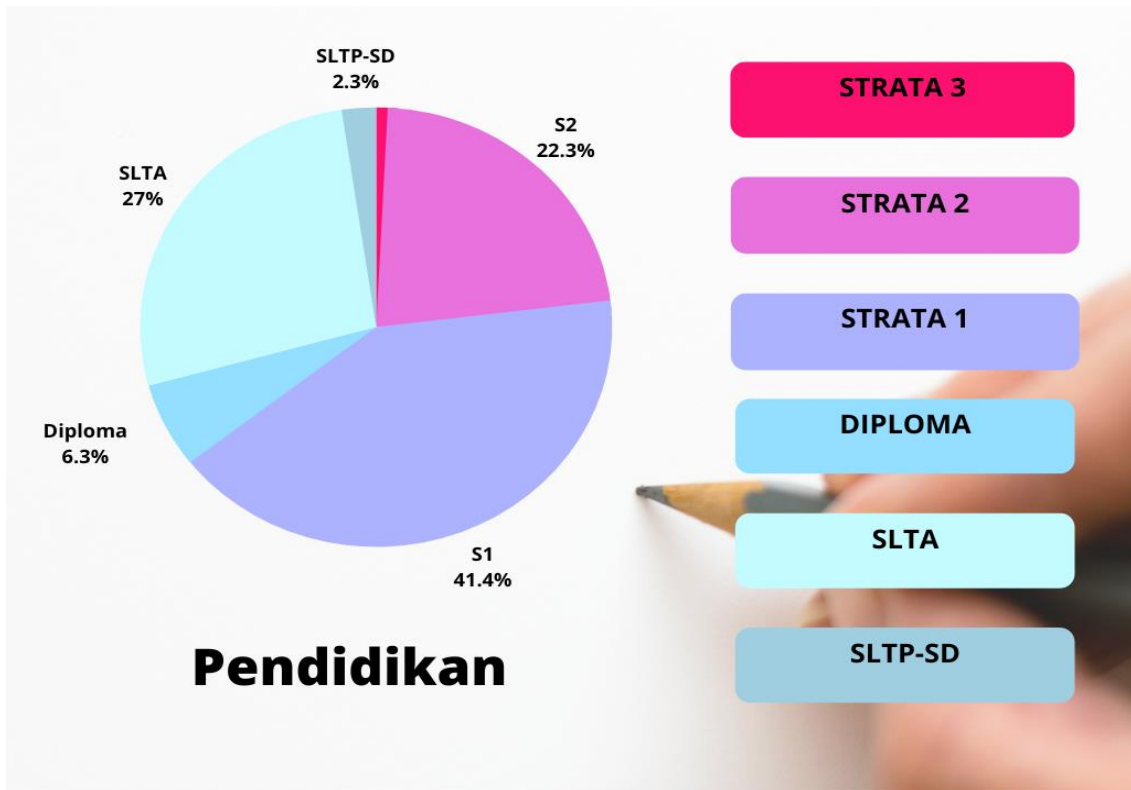
Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah	
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP		SD
1	Sekretaris Daerah		1					1	
2	Staf Ahli		2	1				3	
3	Analisis Kebijakan Utama		2					2	
4	Analisis Kebijakan Madya			1				1	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1					1	
	a. Bagian Tata Pemerintahan		3	9	3	3		18	
	b. Bagian Perundang-undangan		3	14				17	
	c. Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum		4	9		2		15	
	d. Bagian Kesejahteraan Rakyat		3	4		5		12	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan								
	a. Bagian Perekonomian		3	3	2	4		12	
	b. Bagian Administrasi Pembangunan	2	4	4		1		11	
	c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa		10	25		8		43	
	d. Bagian Sumber Daya Alam		6	3		1		10	
7	Asisten Administrasi Umum								
	a. Bagian Organisasi		3	10	1	2		16	
	b. Bagian Umum		4	14	5	34	5	63	
	c. Bagian Perencanaan dan Keuangan		4	6		4		14	
	d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4	2	5	5		16	
	Total	2	57	106	16	69	5	1	256

Sumber: SubBagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian (kondisi per Desember 2022)

Diagram. 1.3

Persentase Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan



Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan Golongan Ruang menunjukkan adalah sebagai berikut: Golongan IV berjumlah 33 orang (12,89%), pegawai dengan Golongan III berjumlah 159 orang (62,11 %), pegawai berpendidikan Golongan II berjumlah 62 orang (24,22%), dan pegawai dengan Golongan I berjumlah 2 orang (0,78%).

Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2022 berdasarkan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel 1.2 dan diagram 1.2 berikut:

Tabel. 1.2

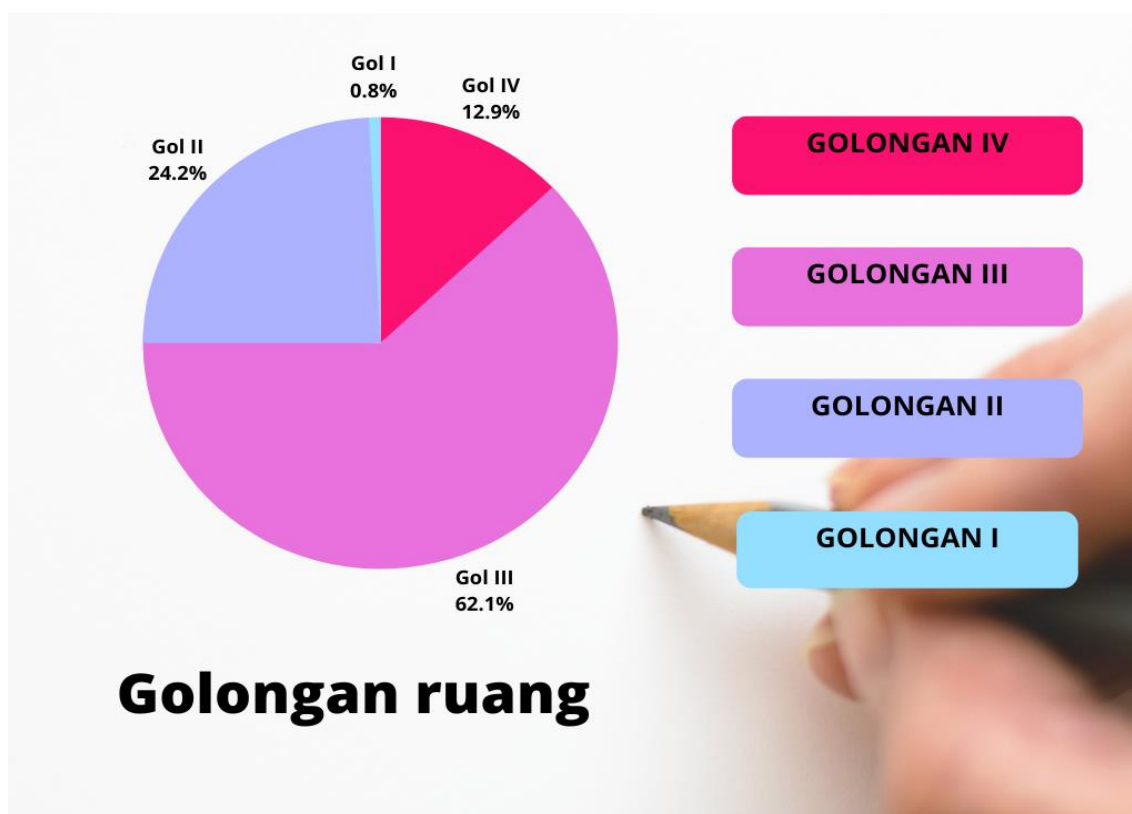
Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Unit Kerja	Golongan Ruang				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris Daerah	1				1
2	Staf Ahli	3				3
3	Analisis Kebijakan Utama	2				2
4	Analisis Kebijakan Madya	1				1
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1				1
	a. Bagian Tata Pemerintahan	3	14	1		18
	b. Bagian Perundang-undangan	3	14			17
	c. Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum	1	13	2		15
	d. Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	8	3		12
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan					
	a. Bagian Perekonomian	2	7	3		12
	b. Bagian Administrasi Pembangunan	3	7	1		11
	c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa	1	38	4		43
	d. Bagian Sumber Daya Alam	4	5	1		10
7	Asisten Administrasi Umum					
	a. Bagian Organisasi	2	12	2		16
	b. Bagian Umum	2	22	37	2	63
	c. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	10	3		14
	d. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	9	5		16
	Total	33	159	62	2	256

Sumber: SubBagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian (kondisi per Desember 2022)

Diagram. 1.2

Persentase Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut: Laki- Laki berjumlah 174 orang (67,97%), dan pegawai dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 82 orang (32,03%).

Data Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2022 berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.3 dan diagram 1.3 berikut:

Tabel. 1.3

Data PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

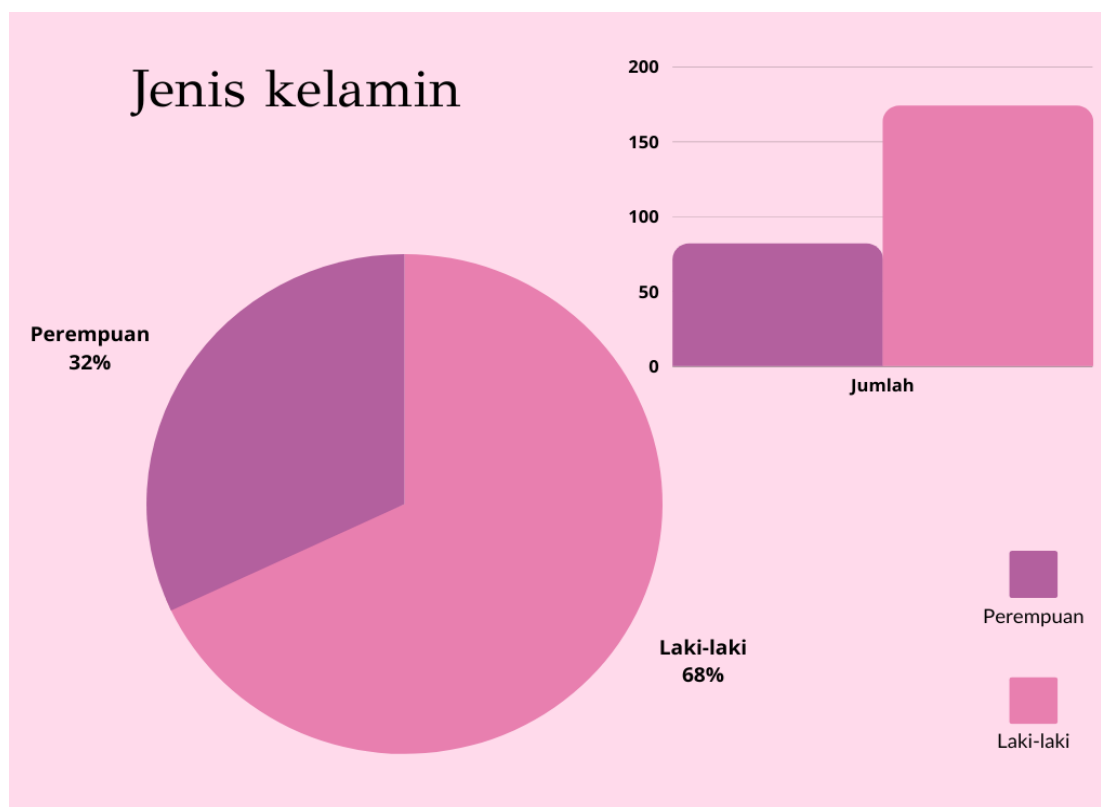
No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1	Sekretaris Daerah	1		1
2	Staf Ahli	3		3
	Analisis Kebijakan Utama	2		2
3	Analisis Kebijakan Madya	1		1
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1		1
	a. Bagian Tata Pemerintahan	13	5	18
	b. Bagian Perundang- undangan	10	7	17

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
	c. Bagian Kerjasama dan Bantuan Hukum	7	8	15
	d. Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	4	12
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan			
	a. Bagian Perekonomian	4	8	12
	b. Bagian Administrasi Pembangunan	6	5	11
	c. Bagian Pengadaan Barang /Jasa	29	14	43
	d. Bagian Sumber Daya Alam	5	5	10
6	Asisten Administrasi Umum			
	e. Bagian Organisasi	8	8	16
	f. Bagian Umum	48	15	63
	g. Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	2	14
	h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15	1	16
	Total	174	82	256

Sumber: SubBagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan kepegawaian (kondisi per Desember 2022)

Diagram. 1.3

Persentase Data Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin



C. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 terutama berkaitan dengan masih kurangnya perumusan kebijakan umum bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Hal ini terutama berkaitan dengan adanya tuntutan masyarakat maupun stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Secara rinci aspek strategis yang berpengaruh dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan daerah yang efektif memecahkan permasalahan pemerintahan dan pembangunan pada setiap bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
2. Kurangnya kapasitas aparatur sipil Negara dalam mengkaji dan merumuskan kebijakan;
3. Belum efektifnya fasilitasi dan koordinasi dalam meningkatkan kehidupan umat beragama;
4. Banyaknya produk hukum daerah yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang baru dan kebutuhan masyarakat;
5. Masih banyaknya perkara hukum yang melibatkan aparatur yang perlu difasilitasi;
6. Diperlukannya kerjasama yang efektif baik antar daerah dan pihak ketiga dalam upaya percepatan pembangunan;
7. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program pembangunan sebagai kontrol keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan;
8. Diperlukannya penataan kelembagaan Perangkat Daerah agar lebih efektif melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai bidang kewenangan yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan;
9. Belum seluruh Perangkat Daerah memiliki SPM atau SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya;
10. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan terhadap pimpinan daerah dalam penyelenggaraan tugas;
11. Dinamisnya peraturan pemerintah pusat tentang pengadaan barang/jasa;
12. Kurang memadainya sarana/prasarana kerja dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;
13. Masih Belum optimalnya sinergitas antara BUMD dan SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Bupati.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022.

A. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 -2023

Tabel 2.1

Tabel Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TAHUN		
				2021	2022	2023
Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Penyusunan Kebijakan yang berkualitas	Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik			100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	87,50	88,89	90,28
			Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,45	3,50	3,55
			Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

B. Indikator Kinerja Utama

Dari sekian banyak indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan, ada beberapa indikator yang merupakan Indikator Kerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan jabatan yang ada. IKU ini adalah indikator penilaian kinerja terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah mendapatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :

1. Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik
 - a. Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik;
 - b. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
1	Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik	100%
a	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	88,89%
b	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin 3,50
c	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat waktu

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja (Jankin) Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 disusun sesuai DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor 2022 dan dilakukan perubahan sesuai DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor 2022. Perjanjian Kinerja Setda memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator *outcomes* berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022, tercantum dalam belanja operasi (belanja program/ kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp 150.910.547.513,-

Dalam perubahan perjanjian kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah merencanakan 3 program, 20 kegiatan, dan 77 subkegiatan yang terbagi dalam 2 program utama dan 1 program penunjang, yaitu:

A. Program Utama

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 4 kegiatan dan 12 subkegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 33.068.816.906,-

Adapun kegiatannya yaitu:

- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.439.603.142,-
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.052.215.428,-
- c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.346.156.086,-

- d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 230.842.250,-
- 2. Program Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 4 kegiatan dan 12 subkegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 13.323.396.840,-

Adapun kegiatannya yaitu:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.501.032.475,-
- b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan nilai anggaran sebesar Rp 3.497.090.258,-
- c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.826.760.057,-
- d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan nilai anggaran sebesar Rp 498.514.050,-

B. Program Penunjang

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 12 kegiatan dan 50 subkegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 104.518.333.767,-

Adapun kegiatannya yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 456.894.304,-
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 53.799.436.537,-
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 14.479.470,-
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 548.718.572,-
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 20.030.382.094,-
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 4.846.645.913,-
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 10.505.163.320,-
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 3.739.314.481,-
- i. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 6.373.155.432,-

- j. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.126.172.950,-
- k. Kegiatan Penataan Organisasi dengan nilai anggaran sebesar Rp 642.403.150,-
- l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.435.567.544,-

Secara lengkap Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 disajikan pada Lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

b. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2021

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	> 90 - 100	Sangat Memuaskan	Hijau
2	> 80 - 90	Memuaskan	Hijau Muda
3	>70 - 80	Sangat Baik	Biru
4	> 60 - 70	Baik	Kuning Tua
5	> 50 - 60	Cukup	Kuning
6	>30 - 50	Kurang	Merah
7	0-30	Sangat Kurang	Abu- Abu

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0

B. Analisis Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	IKU Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik	%	100	100	100
a	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	88,89	97,33	109,49
b	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	3,50	N/A	N/A
c	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja organisasi mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022.

Tahun 2022 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja, dalam sasaran 1 terkait *Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik* merupakan komposit (gabungan) dari beberapa indikator permasalahan pembangunan sesuai bidangnya, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	88,89	97,33	109,49	Sangat Memuaskan
	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	3,50	N/A	N/A	N/A
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Sangat Memuaskan

Berdasarkan tabel 3.3 dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2022 adalah 104,75% dengan kategori **sangat memuaskan**. Dari 1 (satu) sasaran di atas dengan 3 (tiga) indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Melampaui target ($\geq 101\%$) sebanyak 1 (satu) indikator kinerja
2. Sesuai dengan target (100%) sebanyak 1 (satu) indikator kinerja
3. Belum sesuai target ($< 100\%$) sebanyak 0 (nol) indikator kinerja
4. Belum ada data sebanyak 1 (satu) indikator kinerja.

3. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja, untuk setiap indikator kinerja sasaran dilakukan analisis/penjelasan capaian kinerja disesuaikan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan

pelayanan publik mendapat kategori sangat memuaskan dengan capaian nilai kinerja sebesar 104,75%, hasil pengukuran melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik, mendapat kategori sangat memuaskan dengan capaian sebesar 109,49%, dari target 88,89% terealisasi sebesar 97,33%. IKM merupakan salah diantara tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public, pelaksanaan survey IKM telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Melalui hasil survei ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat). Tujuannya untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. Nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
 Nilai persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	76,61-88,30	B	Baik
4	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor terhadap 75 perangkat daerah dan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, didapatkan hasil nilai tertinggi yaitu 99,09 dan nilai terendah yaitu 73,93 dengan persentase berkriteria baik sebesar 97,33%, dengan rincian sebagai berikut:

6 (enam) perangkat daerah mendapatkan predikat sangat baik
67 (enam puluh tujuh) perangkat daerah mendapatkan predikat baik
2 (dua) perangkat daerah mendapatkan predikat kurang baik
(Lampiran 3.1)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Penelitian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Menciptakan persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
4. Mendukung pencapaian prioritas dan fokus pembangunan daerah.

2. Indikator Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2021 Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) belum ditetapkan oleh Kemendagri, untuk penilaian LPPD terakhir dari Kemendagri pada Tahun 2018 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2018 Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan poin sebesar poin 3,40 dengan status kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dari target poin 3,45 dengan capaian sebesar 98,55%, mendapat kategori sangat memuaskan. Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan penilaian atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas: (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal. Hal ini berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri

atas: (1) capaian kinerja makro; (2) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan (3) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan indikator kunci hasil dan indikator kunci keluaran terdiri dari 31 urusan:

1. pendidikan
2. kesehatan
3. pekerjaan umum
4. perumahan rakyat
5. trantibumlinmas
6. sosial
7. tenaga kerja
8. perlindungan perempuan dan perlindungan anak
9. pangan
10. pertanian
11. lingkungan hidup
12. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13. pemberdayaan masyarakat dan desa
14. pengendalian penduduk dan kb
15. perhubungan
16. komunikasi informasi, statistik, persandian
17. koperasi dan usaha kecil
18. penanaman modal
19. kepemudaan dan olahraga kebudayaan
20. kebudayaan
21. perpustakaan
22. kearsipan
23. kelautan dan perikanan
24. pariwisata
25. pertanian
26. kehutanan
27. energi sumberdaya mineral
28. perdagangan
29. perindustrian
30. transmigrasi
31. fungsi penunjang urusan pemerintahan (perencanaan dan keuangan)

Laporan LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah. LPPD merupakan informasi utama untuk Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun tahapan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam review LPPD sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tahapan dan Uraian Kegiatan Review LPPD

No.	Tahap	Uraian kegiatan
1.	Perencanaan	a. Persiapan Pembentukan Tim
		b. Penyusunan Program Kerja
		c. Penyelarasan Program Kerja
		d. Pengumpulan data dan informasi
2.	Pelaksanaan	a. Penelaahan data dan dokumen
		b. Pengumpulan bukti dukung melalui desk SKPD
		c. Permintaan keterangan dengan SKPD dan Tim Penyusun LPPD
		d. Analisis
		e. Penyusunan Kertas Kerja
3.	Pelaporan	a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu
		b. Penyusunan Laporan Hasil Reviu

- Indikator Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tepat waktu/tidak tepat waktu mendapat kategori sangat memuaskan dengan capaian 100% dari target tepat waktu terealisasi tepat waktu. LKPJ Kabupaten Bogor Akhir Tahun Anggaran 2021 disampaikan oleh Bupati Bogor kepada DPRD Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Maret 2022 melalui surat Nomor 131/848-Adbang. LKPJ merupakan laporan informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. LKPJ Tahun 2021 merupakan LKPJ akhir tahun anggaran, disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ berisi: (1) arah kebijakan umum pemerintah daerah, memuat: visi, misi, strategi, kebijakan, prioritas daerah. (2) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, memuat: pengelolaan pendapatan daerah. (3)

Penyelenggaraan urusan desentralisasi, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. (4) Penyelenggaraan tugas pembantuan, memuat tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah dan provinsi beserta permasalahan dan solusi. (5) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Penyajian LKPJ diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif, jujur, apa adanya, mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga mempermudah DPRD memberikan rekomendasi yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

(Lampiran 3.2)

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022			2023
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik	%	100	100	100	100	100	100	100
a	Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik	%	87,50	86,11	98,41	88,89	97,33	109,49	90,28
b	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	3,45	N/A	N/A	3,50	N/A	N/A	3,55
c	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 3 indikator yaitu :

a. Analisis capaian kinerja dan realisasi tahun sebelumnya

1. Indikator " Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik" pada Tahun 2021 terealisasi 86,11% dari target sebesar 87,50 % dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,41% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pada Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 97,33% dari target sebesar 88,89% dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,49 %. Bila dibandingkan terdapat kenaikan capaian yang cukup signifikan sebesar 11,08% indikator kinerja tersebut tetap mendapat predikat yang sangat memuaskan. Analisis realisasi kinerja 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra maka Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Bogor yang melebihi target disebabkan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :
 - a. Adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Seluruh perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survey Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparaturnya pengawas internal;
 - d. Meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan badan layanan umum daerah.
2. Indikator "Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" pada Tahun 2022 belum ada penilaian dari target sebesar 3,55 point yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pada Tahun 2022 belum ada penilaian dari target sebesar 88,89% sehingga belum dapat dilakukan analisa. Untuk meningkatkan target capaian di tahun 2022 dilakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan SDM melalui pelaksanaan sosialisasi penyusunan LPPD,
 - b. Membangun Komitmen bersama seluruh SKPD dalam melengkapi dokumen pendukung berupa IKK tiap SKPD sesuai urusan.

3. Indikator “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu” pada Tahun 2021 terealisasi “tepat waktu” dari target kinerja “tepat waktu” dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pada Tahun 2022 terealisasi “tepat waktu” dari target kinerja “tepat waktu” dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Bila dibandingkan antara tahun 2021 dan tahun 2022 maka indikator kinerja tersebut memenuhi target selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Keberhasilan dalam pencapaian target disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam memenuhi data-data pendukung dokumen LKPJ;
- b. Dilaksanakannya desk pengumpulan data-data pendukung dokumen LKPJ.

b. Analisis realisasi kinerja 2022 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra

Tahun 2022 adalah tahun ke-2 perubahan Renstra Sekretariat Daerah

1. Indikator "Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik" pada tahun 2022 capaian kinerja sebesar 97,33% bila dibandingkan dengan target akhir perubahan renstra sebesar 90,28% maka capaian kinerjanya dapat dihitung sebagai berikut : realisasi tahun 2022 sebesar 97,33% dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 90,28% , maka diperoleh hasil 107,80% yang berarti telah melampaui target akhir renstra.
2. Indikator “Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” pada pada tahun 2022 belum ada penilaian dari target renstra sebesar 3,55 pont sehingga belum dapat dilakukan analisa.
3. Indikator “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu” pada Tahun 2022 terealisasi “tepat waktu” bila dibandingkan dengan target akhir perubahan renstra ”tepat waktu” maka capaian kinerjanya maka diperoleh hasil 100% yang berarti telah sesuai dengan target akhir renstra.

4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp 141.096.374.066,- atau 93,50% dari pagu sebesar Rp 150.910.547.513,- terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 131.461.765.066,- atau 94,72% dari pagu sebesar Rp 138.793.552.623,- dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 9.634.609.000,- atau 79,51% dari pagu sebesar Rp 12.116.994.890,-

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	138.793.552.623,-	131.461.765.066,-	(2.513.078.893,-)	94,72
5.1.01	Belanja Pegawai	62.863.481.729,-	60.350.402.836,-	(2.513.078.893,-)	96,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.480.070.894,-	56.181.362.230,-	(4.298.708.664,-)	92,89
5.1.05	Belanja Hibah	15.450.000.000,-	14.930.000.000,-	(520.000.000,-)	96,63
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.2	BELANJA MODAL	12.116.994.890,-	9.634.609.000,-	(2.482.385.890,00)	79,51
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.270.348.977,-	6.086.477.000	(1.183.871.977,-)	83,72
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.704.694.817	3.411.461.000,-	(1.293.233.817,-)	72,51
5.2.05	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.951.096,-	136.671.000,-	(5.280.096,00)	96,28
	JUMLAH BELANJA DAERAH	150.910.547.513,-	141.096.374.066,-	(9.814.173.447,-)	93,50

Diagram 3.1
Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

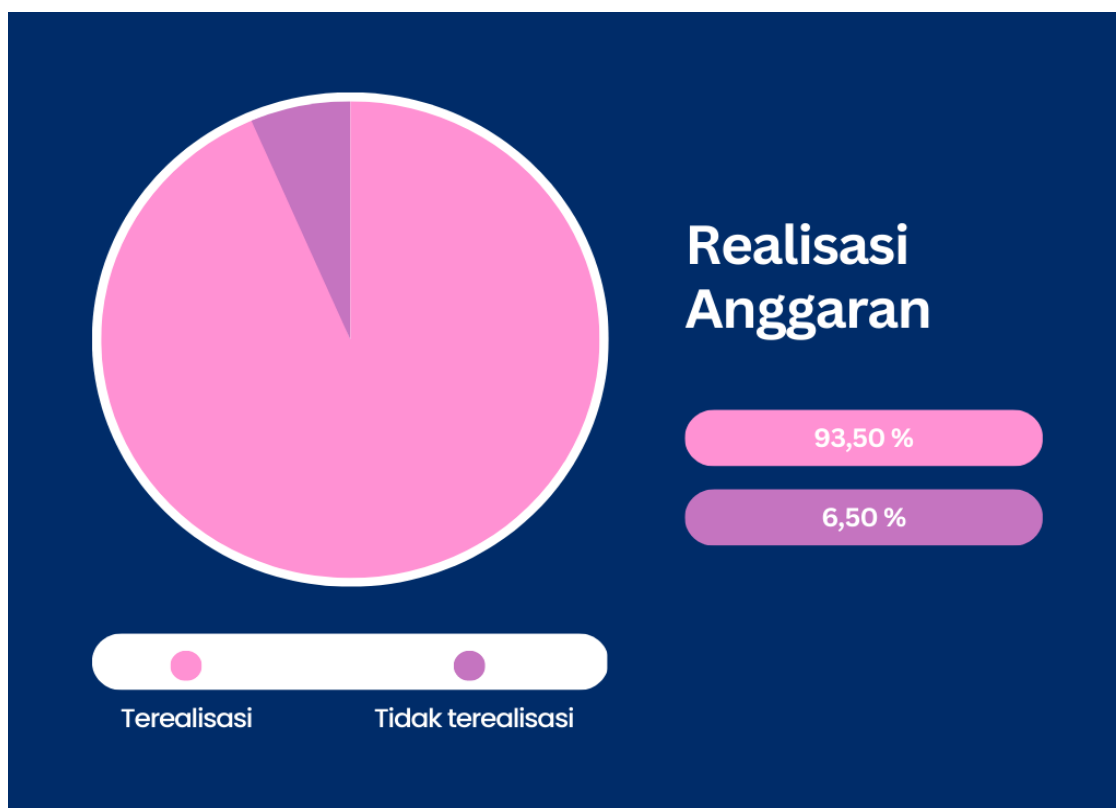


Diagram 3.2
Komposisi Belanja Daerah Sekretariat Daerah

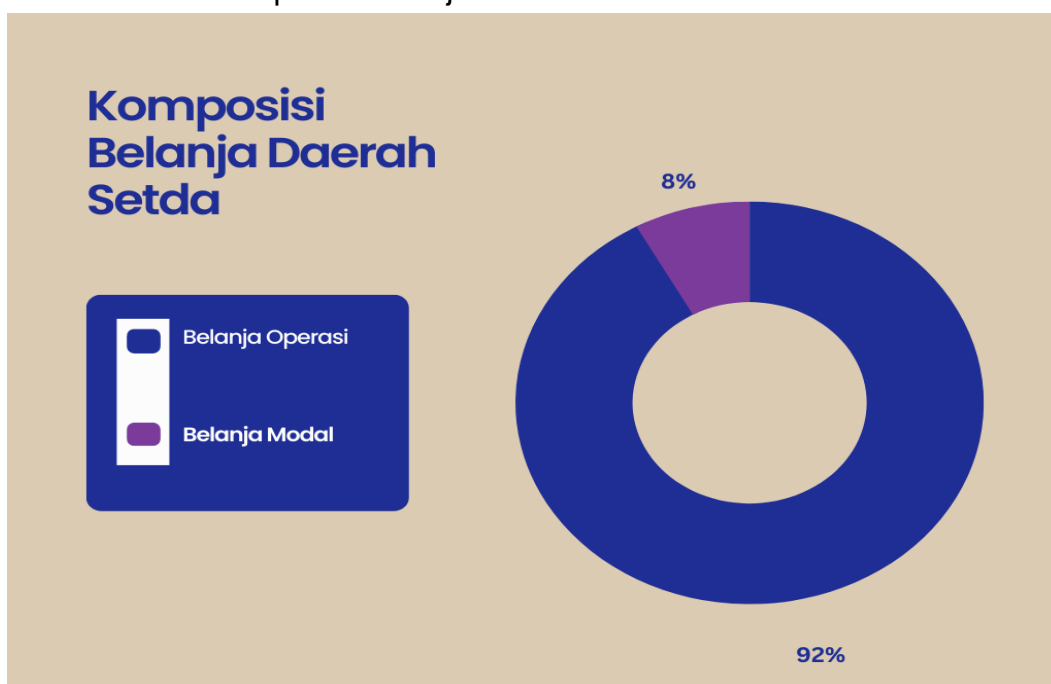


Diagram 3.3
Realisasi Belanja Daerah Sekretariat Daerah

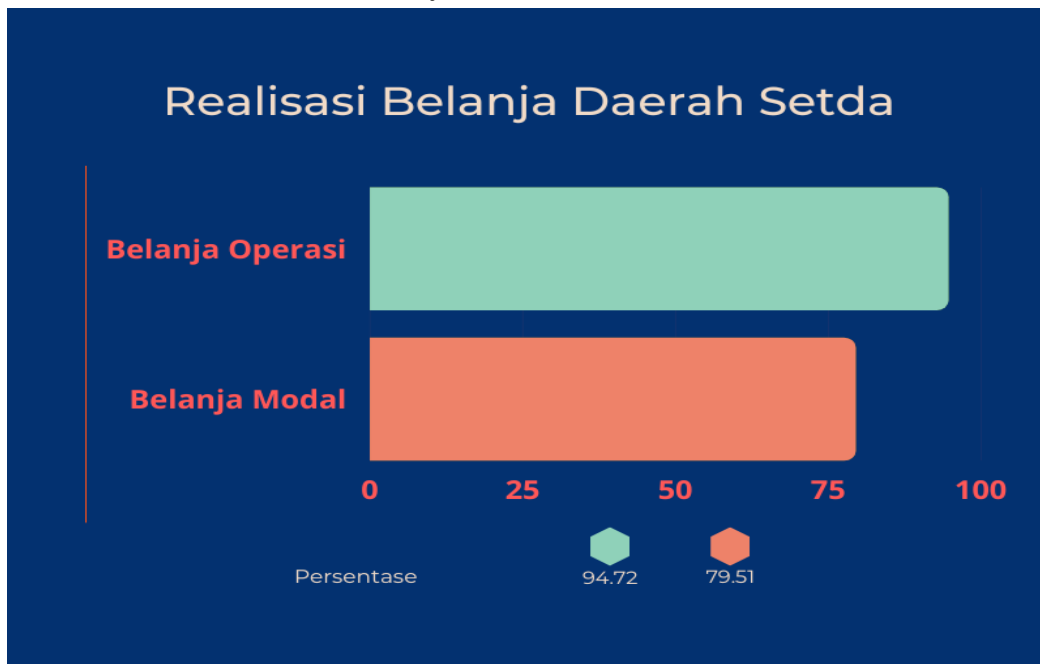


Diagram 3.4
Komposisi Belanja Operasi

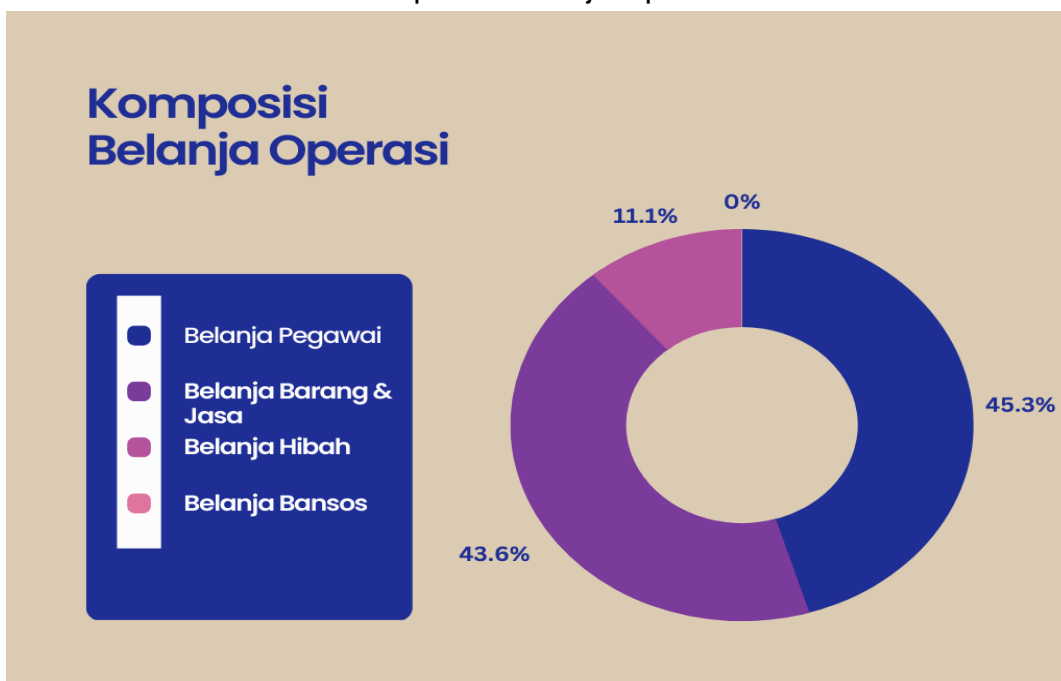


Diagram 3.5
Realisasi Belanja Operasi

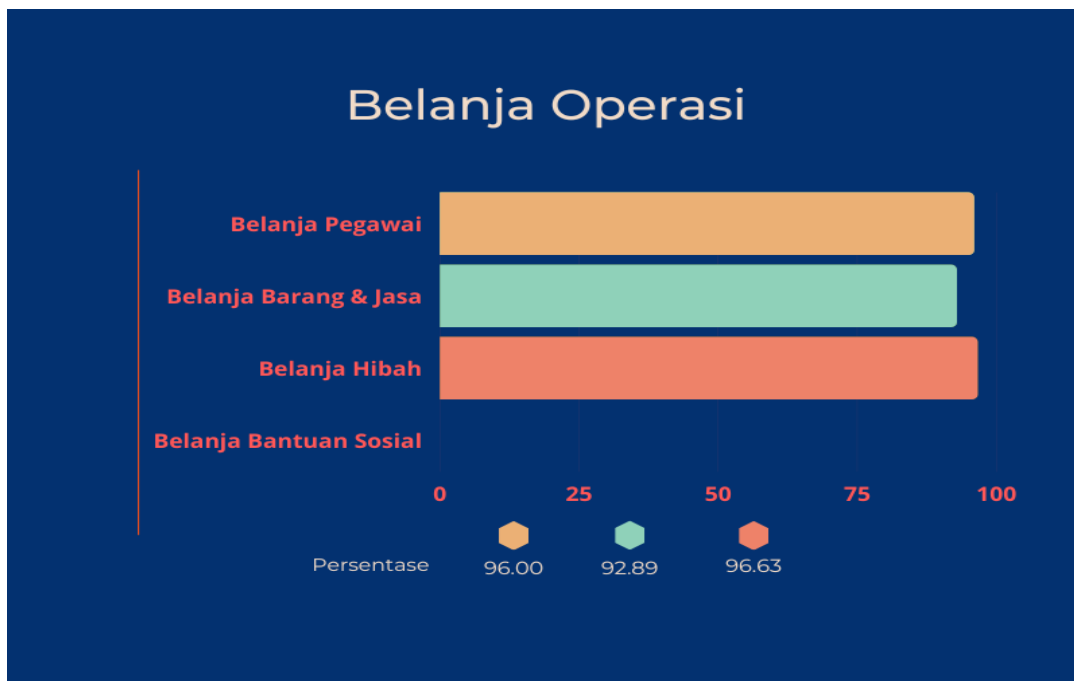


Diagram 3.6
Komposisi Belanja Modal

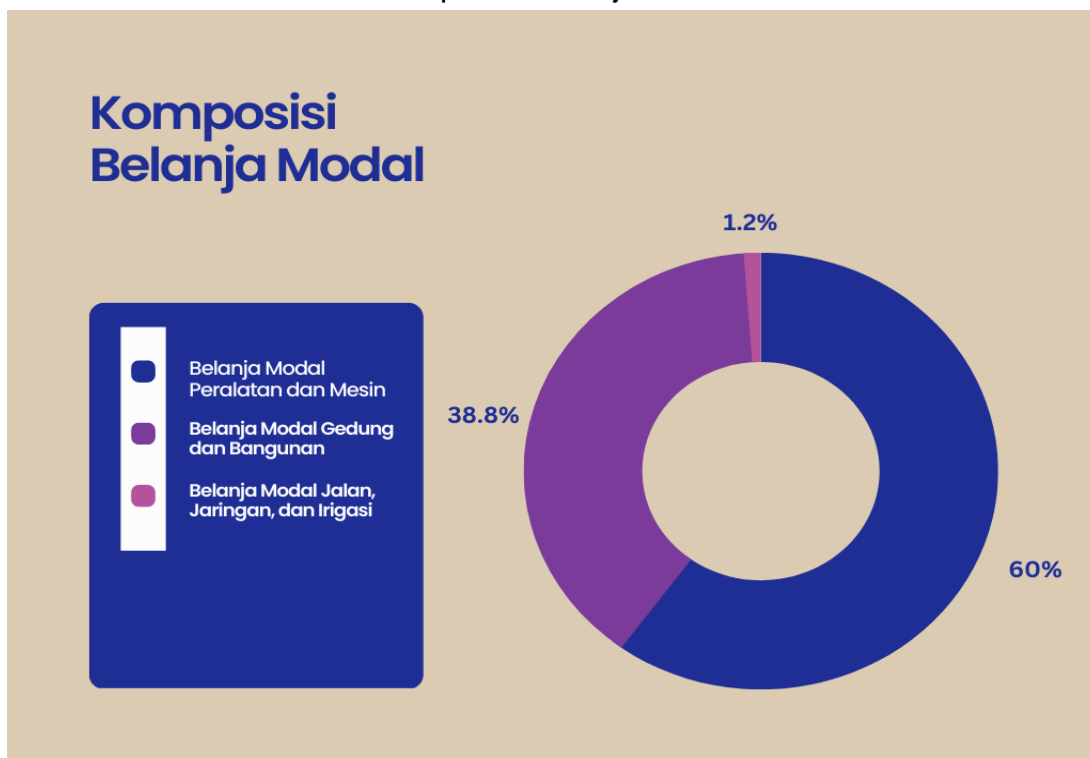
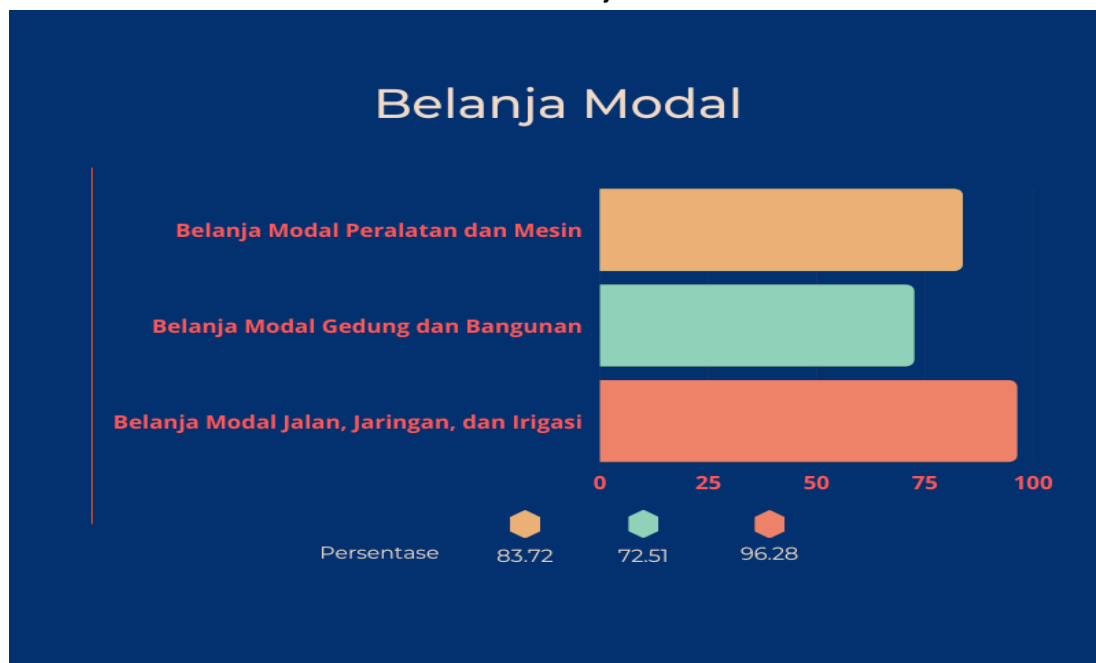


Diagram 3.7
Realisasi Belanja Modal



1. Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis efisiensi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencapaian output sesuai dengan rencananya. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 150.910.547.513,- terealisasi Rp 141.096.374.066,- atau 93,50%, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 100%, dengan demikian efisiensi anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 6,50%. Hasil analisis efisiensi pelaksanaan program Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Masing – Masing Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capain Realisasi Anggaran %	Capain Realisasi Fisik(%)	Ket
	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik					
I	Program Pemerintahan dan Kesra	33.068.816.906,-	30.950.682.140,-	93,59	100,00	Efisien

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capain Realisasi Anggaran %	Capain Realisasi Fisik(%)	Ket
1.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.439.603.142,-	2.378.511.222,-	97,50	100,00	Efisien
2.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.052.215.428,-	27.074.652.220,-	93,19	100,00	Efisien
3.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.346.156.086,-	1.311.207.668,-	97,40	141,55	Efisien
4.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah					Efisien
II	Program Perekonomian dan Pembangunan	13.323.396.840,-	12.704.676.999,-	95,36	100,00	Efisien
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.501.032.475,-	1.326.728.143,-	88,39	105,00	Efisien
2.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	3.497.090.258,-	3.306.780.514,-	94,56	100,00	Efisien
3.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	7.826.760.057,-	7.581.290.146,-	96,86	99,14	Efisien
4.	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	498.514.050,-	489.878.196,-	98,27	100,00	Efisien

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capain Realisasi Anggaran %	Capain Realisasi Fisik(%)	Ket
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	104.518.333.767,-	97.441.014.927,-	93,23	100,00	Efisien
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456.894.304,-	428.456.965,-	93,78	100,00	Efisien
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.799.436.537,-	52.744.298.110,-	98,09	100,00	Efisien
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.479.470,-	12.823.700,-	88,56	100,00	Efisien
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	548.718.572,-	506.717.350,-	92,35	100,00	Efisien
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.030.382.094,-	18.398.675.917,-	91,85	100,00	Efisien

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capain Realisasi Anggaran %	Capain Realisasi Fisik(%)	Ket
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.846.645.913,-	3.548.132.000,-	73,21	100,00	Efisien
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.505.163.320,-	9.577.366.146,-	91,17	100,00	Efisien
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.739.314.481,-	3.385.522.742,-	90,54	100,00	Efisien
9.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.373.155.432,-	4.822.651.994,-	75,67	100,00	Efisien
10.	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.126.172.950,-	1.012.627.400,-	89,92	100,00	Efisien

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capain Realisasi Anggaran %	Capain Realisasi Fisik(%)	Ket
11.	Kegiatan Penataan Organisasi	642.403.150,-	633.882.150,-	98,67	100,00	Efisien
12.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.435.567.544,-	2.339.860.453,-	96,07	100,00	Efisien

BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.

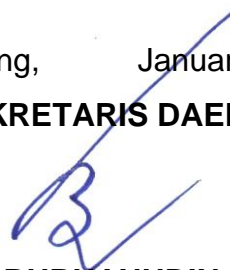
Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2022, sehingga beberapa program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2022, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh perangkat daerah maupun badan layanan umum daerah serta komitmen dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai IKM perangkat daerah di Kabupaten Bogor;
2. Melakukan peningkatan kualitas SDM dan koordinasi yang lebih intensif dengan seluruh perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal untuk dapat meningkatkan Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor;
3. Menjadwalkan penyusunan LKPJ Bupati yang terencana dan meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan data pendukung sehingga dapat mempertahankan penyampaian LKPJ Bupati yang tepat waktu;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan selama masa pandemi dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022 secara tepat waktu.

Cibinong, Januari 2023,

SEKRETARIS DAERAH



Drs. BURHANUDIN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196404181985031015



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs BURHANUDIN M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IWAN SETIAWAN
Jabatan : PLT. BUPATI BOGOR
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA

IWAN SETIAWAN

Bogor, 30 November 2022

PIHAK PERTAMA

Drs BURHANUDIN M.Si
NIP. 196404181985031015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik	Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik	%	100
		Perangkat Daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori baik	%	88,89
		Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Point	3,50
		Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104,518,333,767	APBD
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33,356,681,174	APBD
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	13,323,396,840	APBD, DBHCHT

Bogor, 30 November 2022



SEKRETARIS DAERAH

Drs BURHANUDIN M.Si
NIP. 196404181985031015



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI

TAHUN ANGGARAN 2022

PERIODE : 1 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

SATKER : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : 4.01.0.00.0.00.01.000
2 SEMUA SUB UNIT

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
5	BELANJA DAERAH						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.518.333.767,00	0,00	97.441.014.927,00	97.441.014.927,00	(7.077.318.840,00)	93,23
4.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	456.894.304,00	0,00	428.456.965,00	428.456.965,00	(28.437.339,00)	93,78
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161.618.586,00	0,00	143.456.911,00	143.456.911,00	(18.161.675,00)	88,76
4.01.01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	161.618.586,00	0,00	143.456.911,00	143.456.911,00	(18.161.675,00)	88,76
4.01.01.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.618.586,00	0,00	143.456.911,00	143.456.911,00	(18.161.675,00)	88,76
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	71.970.950,00	0,00	71.910.950,00	71.910.950,00	(60.000,00)	99,92
4.01.01.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	71.970.950,00	0,00	71.910.950,00	71.910.950,00	(60.000,00)	99,92
4.01.01.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.970.950,00	0,00	71.910.950,00	71.910.950,00	(60.000,00)	99,92
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.104.600,00	0,00	30.698.100,00	30.698.100,00	(406.500,00)	98,69
4.01.01.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	31.104.600,00	0,00	30.698.100,00	30.698.100,00	(406.500,00)	98,69
4.01.01.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.104.600,00	0,00	30.698.100,00	30.698.100,00	(406.500,00)	98,69
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.660.950,00	0,00	28.472.000,00	28.472.000,00	(188.950,00)	99,34
4.01.01.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	28.660.950,00	0,00	28.472.000,00	28.472.000,00	(188.950,00)	99,34
4.01.01.2.01.04.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.660.950,00	0,00	28.472.000,00	28.472.000,00	(188.950,00)	99,34
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.120.200,00	0,00	29.220.650,00	29.220.650,00	(899.550,00)	97,01
4.01.01.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	30.120.200,00	0,00	29.220.650,00	29.220.650,00	(899.550,00)	97,01
4.01.01.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.120.200,00	0,00	29.220.650,00	29.220.650,00	(899.550,00)	97,01

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.601.268,00	0,00	78.266.604,00	78.266.604,00	(7.334.664,00)	91,43
4.01.01.2.01.06.5.1	BELANJA OPERASI	85.601.268,00	0,00	78.266.604,00	78.266.604,00	(7.334.664,00)	91,43
4.01.01.2.01.06.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.601.268,00	0,00	78.266.604,00	78.266.604,00	(7.334.664,00)	91,43
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.817.750,00	0,00	46.431.750,00	46.431.750,00	(1.386.000,00)	97,10
4.01.01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	47.817.750,00	0,00	46.431.750,00	46.431.750,00	(1.386.000,00)	97,10
4.01.01.2.01.07.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.817.750,00	0,00	46.431.750,00	46.431.750,00	(1.386.000,00)	97,10
4.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	53.799.436.537,00	0,00	52.774.298.110,00	52.774.298.110,00	(1.025.138.427,00)	98,09
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.960.149.161,00	0,00	52.089.210.842,00	52.089.210.842,00	(870.938.319,00)	98,36
4.01.01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	52.960.149.161,00	0,00	52.089.210.842,00	52.089.210.842,00	(870.938.319,00)	98,36
4.01.01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	52.960.149.161,00	0,00	52.089.210.842,00	52.089.210.842,00	(870.938.319,00)	98,36
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	568.718.054,00	0,00	464.691.164,00	464.691.164,00	(104.026.890,00)	81,71
4.01.01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	568.718.054,00	0,00	464.691.164,00	464.691.164,00	(104.026.890,00)	81,71
4.01.01.2.02.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.718.054,00	0,00	464.691.164,00	464.691.164,00	(104.026.890,00)	81,71
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	102.288.636,00	0,00	66.961.598,00	66.961.598,00	(35.327.038,00)	65,46
4.01.01.2.02.04.5.1	BELANJA OPERASI	102.288.636,00	0,00	66.961.598,00	66.961.598,00	(35.327.038,00)	65,46
4.01.01.2.02.04.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.288.636,00	0,00	66.961.598,00	66.961.598,00	(35.327.038,00)	65,46
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	101.957.786,00	0,00	89.773.106,00	89.773.106,00	(12.184.680,00)	88,05
4.01.01.2.02.05.5.1	BELANJA OPERASI	101.957.786,00	0,00	89.773.106,00	89.773.106,00	(12.184.680,00)	88,05
4.01.01.2.02.05.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.957.786,00	0,00	89.773.106,00	89.773.106,00	(12.184.680,00)	88,05
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39.619.850,00	0,00	38.551.350,00	38.551.350,00	(1.068.500,00)	97,30
4.01.01.2.02.07.5.1	BELANJA OPERASI	39.619.850,00	0,00	38.551.350,00	38.551.350,00	(1.068.500,00)	97,30
4.01.01.2.02.07.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.619.850,00	0,00	38.551.350,00	38.551.350,00	(1.068.500,00)	97,30
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.703.050,00	0,00	25.110.050,00	25.110.050,00	(1.593.000,00)	94,03
4.01.01.2.02.08.5.1	BELANJA OPERASI	26.703.050,00	0,00	25.110.050,00	25.110.050,00	(1.593.000,00)	94,03
4.01.01.2.02.08.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.02.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.703.050,00	0,00	25.110.050,00	25.110.050,00	(1.593.000,00)	94,03

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	14.479.470,00	0,00	12.823.700,00	12.823.700,00	(1.655.770,00)	88,56
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.335.970,00	0,00	3.032.700,00	3.032.700,00	(303.270,00)	90,91
4.01.01.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.335.970,00	0,00	3.032.700,00	3.032.700,00	(303.270,00)	90,91
4.01.01.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.335.970,00	0,00	3.032.700,00	3.032.700,00	(303.270,00)	90,91
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.021.250,00	0,00	1.835.500,00	1.835.500,00	(185.750,00)	90,81
4.01.01.2.03.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.021.250,00	0,00	1.835.500,00	1.835.500,00	(185.750,00)	90,81
4.01.01.2.03.05.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.021.250,00	0,00	1.835.500,00	1.835.500,00	(185.750,00)	90,81
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.122.250,00	0,00	7.955.500,00	7.955.500,00	(1.166.750,00)	87,21
4.01.01.2.03.06.5.1	BELANJA OPERASI	9.122.250,00	0,00	7.955.500,00	7.955.500,00	(1.166.750,00)	87,21
4.01.01.2.03.06.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.03.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.122.250,00	0,00	7.955.500,00	7.955.500,00	(1.166.750,00)	87,21
4.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	548.718.572,00	0,00	506.717.350,00	506.717.350,00	(42.001.222,00)	92,35
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	184.530.450,00	0,00	168.425.350,00	168.425.350,00	(16.105.100,00)	91,27
4.01.01.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	184.530.450,00	0,00	168.425.350,00	168.425.350,00	(16.105.100,00)	91,27
4.01.01.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.530.450,00	0,00	168.425.350,00	168.425.350,00	(16.105.100,00)	91,27
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	218.473.422,00	0,00	195.810.300,00	195.810.300,00	(22.663.122,00)	89,63
4.01.01.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	218.473.422,00	0,00	195.810.300,00	195.810.300,00	(22.663.122,00)	89,63
4.01.01.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.473.422,00	0,00	195.810.300,00	195.810.300,00	(22.663.122,00)	89,63
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.714.700,00	0,00	38.873.700,00	38.873.700,00	(1.841.000,00)	95,48
4.01.01.2.05.05.5.1	BELANJA OPERASI	40.714.700,00	0,00	38.873.700,00	38.873.700,00	(1.841.000,00)	95,48
4.01.01.2.05.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.714.700,00	0,00	38.873.700,00	38.873.700,00	(1.841.000,00)	95,48
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000,00	0,00	103.608.000,00	103.608.000,00	(1.392.000,00)	98,67
4.01.01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	0,00	103.608.000,00	103.608.000,00	(1.392.000,00)	98,67
4.01.01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	0,00	103.608.000,00	103.608.000,00	(1.392.000,00)	98,67
4.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	20.030.382.094,00	0,00	18.398.675.917,00	18.398.675.917,00	(1.631.706.177,00)	91,85
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	233.998.224,00	0,00	233.338.910,00	233.338.910,00	(659.314,00)	99,72
4.01.01.2.06.01.5.1	BELANJA OPERASI	233.998.224,00	0,00	233.338.910,00	233.338.910,00	(659.314,00)	99,72
4.01.01.2.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.998.224,00	0,00	233.338.910,00	233.338.910,00	(659.314,00)	99,72
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.876.449.220,00	0,00	7.574.440.457,00	7.574.440.457,00	(1.302.008.763,00)	85,33
4.01.01.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.606.100.243,00	0,00	1.487.963.457,00	1.487.963.457,00	(118.136.786,00)	92,64

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.01.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.606.100.243,00	0,00	1.487.963.457,00	1.487.963.457,00	(118.136.786,00)	92,64
4.01.01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL	7.270.348.977,00	0,00	6.086.477.000,00	6.086.477.000,00	(1.183.871.977,00)	83,72
4.01.01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.270.348.977,00	0,00	6.086.477.000,00	6.086.477.000,00	(1.183.871.977,00)	83,72
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.111.377.350,00	0,00	3.813.141.500,00	3.813.141.500,00	(298.235.850,00)	92,75
4.01.01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.111.377.350,00	0,00	3.813.141.500,00	3.813.141.500,00	(298.235.850,00)	92,75
4.01.01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.111.377.350,00	0,00	3.813.141.500,00	3.813.141.500,00	(298.235.850,00)	92,75
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	740.676.150,00	0,00	722.838.250,00	722.838.250,00	(17.837.900,00)	97,59
4.01.01.2.06.05.1	BELANJA OPERASI	740.676.150,00	0,00	722.838.250,00	722.838.250,00	(17.837.900,00)	97,59
4.01.01.2.06.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.676.150,00	0,00	722.838.250,00	722.838.250,00	(17.837.900,00)	97,59
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.309.050.000,00	0,00	3.303.481.000,00	3.303.481.000,00	(5.569.000,00)	99,83
4.01.01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	3.309.050.000,00	0,00	3.303.481.000,00	3.303.481.000,00	(5.569.000,00)	99,83
4.01.01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.309.050.000,00	0,00	3.303.481.000,00	3.303.481.000,00	(5.569.000,00)	99,83
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.593.819.400,00	0,00	2.589.540.600,00	2.589.540.600,00	(4.278.800,00)	99,84
4.01.01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.593.819.400,00	0,00	2.589.540.600,00	2.589.540.600,00	(4.278.800,00)	99,84
4.01.01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.593.819.400,00	0,00	2.589.540.600,00	2.589.540.600,00	(4.278.800,00)	99,84
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	165.011.750,00	0,00	161.895.200,00	161.895.200,00	(3.116.550,00)	98,11
4.01.01.2.06.10.5.1	BELANJA OPERASI	165.011.750,00	0,00	161.895.200,00	161.895.200,00	(3.116.550,00)	98,11
4.01.01.2.06.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.011.750,00	0,00	161.895.200,00	161.895.200,00	(3.116.550,00)	98,11
4.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.846.645.913,00	0,00	3.548.132.000,00	3.548.132.000,00	(1.298.513.913,00)	73,21
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.075.142.494,00	0,00	1.009.452.000,00	1.009.452.000,00	(1.065.690.494,00)	48,64
4.01.01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	2.075.142.494,00	0,00	1.009.452.000,00	1.009.452.000,00	(1.065.690.494,00)	48,64
4.01.01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.075.142.494,00	0,00	1.009.452.000,00	1.009.452.000,00	(1.065.690.494,00)	48,64
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.974.003.419,00	0,00	1.946.710.000,00	1.946.710.000,00	(27.293.419,00)	98,62
4.01.01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	1.974.003.419,00	0,00	1.946.710.000,00	1.946.710.000,00	(27.293.419,00)	98,62
4.01.01.2.07.10.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.832.052.323,00	0,00	1.810.039.000,00	1.810.039.000,00	(22.013.323,00)	98,80
4.01.01.2.07.10.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.951.096,00	0,00	136.671.000,00	136.671.000,00	(5.280.096,00)	96,28
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	797.500.000,00	0,00	591.970.000,00	591.970.000,00	(205.530.000,00)	74,23
4.01.01.2.07.11.5.2	BELANJA MODAL	797.500.000,00	0,00	591.970.000,00	591.970.000,00	(205.530.000,00)	74,23
4.01.01.2.07.11.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	797.500.000,00	0,00	591.970.000,00	591.970.000,00	(205.530.000,00)	74,23
4.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.505.163.320,00	0,00	9.577.366.146,00	9.577.366.146,00	(927.797.174,00)	91,17
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.079.138.098,00	0,00	963.545.048,00	963.545.048,00	(115.593.050,00)	89,29
4.01.01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.079.138.098,00	0,00	963.545.048,00	963.545.048,00	(115.593.050,00)	89,29

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.079.138.098,00	0,00	963.545.048,00	963.545.048,00	(115.593.050,00)	89,29
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.891.218.412,00	0,00	3.547.719.878,00	3.547.719.878,00	(343.498.534,00)	91,17
4.01.01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	3.891.218.412,00	0,00	3.547.719.878,00	3.547.719.878,00	(343.498.534,00)	91,17
4.01.01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.891.218.412,00	0,00	3.547.719.878,00	3.547.719.878,00	(343.498.534,00)	91,17
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.640.765.000,00	0,00	1.525.301.200,00	1.525.301.200,00	(115.463.800,00)	92,96
4.01.01.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.640.765.000,00	0,00	1.525.301.200,00	1.525.301.200,00	(115.463.800,00)	92,96
4.01.01.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.640.765.000,00	0,00	1.525.301.200,00	1.525.301.200,00	(115.463.800,00)	92,96
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.894.041.810,00	0,00	3.540.800.020,00	3.540.800.020,00	(353.241.790,00)	90,93
4.01.01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	3.894.041.810,00	0,00	3.540.800.020,00	3.540.800.020,00	(353.241.790,00)	90,93
4.01.01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.894.041.810,00	0,00	3.540.800.020,00	3.540.800.020,00	(353.241.790,00)	90,93
4.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.739.314.481,00	0,00	3.385.522.742,00	3.385.522.742,00	(353.791.739,00)	90,54
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	488.119.600,00	0,00	255.354.492,00	255.354.492,00	(232.765.108,00)	52,31
4.01.01.2.09.01.5.1	BELANJA OPERASI	488.119.600,00	0,00	255.354.492,00	255.354.492,00	(232.765.108,00)	52,31
4.01.01.2.09.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.119.600,00	0,00	255.354.492,00	255.354.492,00	(232.765.108,00)	52,31
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	701.382.500,00	0,00	612.721.050,00	612.721.050,00	(88.661.450,00)	87,36
4.01.01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	701.382.500,00	0,00	612.721.050,00	612.721.050,00	(88.661.450,00)	87,36
4.01.01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.382.500,00	0,00	612.721.050,00	612.721.050,00	(88.661.450,00)	87,36
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	409.850.000,00	0,00	398.611.200,00	398.611.200,00	(11.238.800,00)	97,26
4.01.01.2.09.05.5.1	BELANJA OPERASI	409.850.000,00	0,00	398.611.200,00	398.611.200,00	(11.238.800,00)	97,26
4.01.01.2.09.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.850.000,00	0,00	398.611.200,00	398.611.200,00	(11.238.800,00)	97,26
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.139.962.381,00	0,00	2.118.836.000,00	2.118.836.000,00	(21.126.381,00)	99,01
4.01.01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	2.139.962.381,00	0,00	2.118.836.000,00	2.118.836.000,00	(21.126.381,00)	99,01
4.01.01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.139.962.381,00	0,00	2.118.836.000,00	2.118.836.000,00	(21.126.381,00)	99,01
4.01.01.2.11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	6.373.155.432,00	0,00	4.822.651.994,00	4.822.651.994,00	(1.550.503.438,00)	75,67
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.229.698.536,00	0,00	840.530.906,00	840.530.906,00	(389.167.630,00)	68,35
4.01.01.2.11.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.229.698.536,00	0,00	840.530.906,00	840.530.906,00	(389.167.630,00)	68,35
4.01.01.2.11.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.229.698.536,00	0,00	840.530.906,00	840.530.906,00	(389.167.630,00)	68,35
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	206.472.864,00	0,00	197.100.000,00	197.100.000,00	(9.372.864,00)	95,46
4.01.01.2.11.02.5.1	BELANJA OPERASI	206.472.864,00	0,00	197.100.000,00	197.100.000,00	(9.372.864,00)	95,46
4.01.01.2.11.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.472.864,00	0,00	197.100.000,00	197.100.000,00	(9.372.864,00)	95,46

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.936.984.032,00	0,00	3.785.021.088,00	3.785.021.088,00	(1.151.962.944,00)	76,67
4.01.01.2.11.04.5.1	BELANJA OPERASI	4.936.984.032,00	0,00	3.785.021.088,00	3.785.021.088,00	(1.151.962.944,00)	76,67
4.01.01.2.11.04.5.1.01	Belanja Pegawai	4.936.984.032,00	0,00	3.785.021.088,00	3.785.021.088,00	(1.151.962.944,00)	76,67
4.01.01.2.12	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.126.172.950,00	0,00	1.012.627.400,00	1.012.627.400,00	(113.545.550,00)	89,92
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	392.083.000,00	0,00	285.441.200,00	285.441.200,00	(106.641.800,00)	72,80
4.01.01.2.12.01.5.1	BELANJA OPERASI	392.083.000,00	0,00	285.441.200,00	285.441.200,00	(106.641.800,00)	72,80
4.01.01.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.083.000,00	0,00	285.441.200,00	285.441.200,00	(106.641.800,00)	72,80
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	359.384.950,00	0,00	356.756.200,00	356.756.200,00	(2.628.750,00)	99,27
4.01.01.2.12.02.5.1	BELANJA OPERASI	359.384.950,00	0,00	356.756.200,00	356.756.200,00	(2.628.750,00)	99,27
4.01.01.2.12.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.384.950,00	0,00	356.756.200,00	356.756.200,00	(2.628.750,00)	99,27
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	374.705.000,00	0,00	370.430.000,00	370.430.000,00	(4.275.000,00)	98,86
4.01.01.2.12.03.5.1	BELANJA OPERASI	374.705.000,00	0,00	370.430.000,00	370.430.000,00	(4.275.000,00)	98,86
4.01.01.2.12.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.705.000,00	0,00	370.430.000,00	370.430.000,00	(4.275.000,00)	98,86
4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	642.403.150,00	0,00	633.882.150,00	633.882.150,00	(8.521.000,00)	98,67
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	239.741.500,00	0,00	236.413.500,00	236.413.500,00	(3.328.000,00)	98,61
4.01.01.2.13.01.5.1	BELANJA OPERASI	239.741.500,00	0,00	236.413.500,00	236.413.500,00	(3.328.000,00)	98,61
4.01.01.2.13.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.741.500,00	0,00	236.413.500,00	236.413.500,00	(3.328.000,00)	98,61
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	70.332.100,00	0,00	70.095.100,00	70.095.100,00	(237.000,00)	99,66
4.01.01.2.13.02.5.1	BELANJA OPERASI	70.332.100,00	0,00	70.095.100,00	70.095.100,00	(237.000,00)	99,66
4.01.01.2.13.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.332.100,00	0,00	70.095.100,00	70.095.100,00	(237.000,00)	99,66
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100.246.950,00	0,00	99.046.950,00	99.046.950,00	(1.200.000,00)	98,80
4.01.01.2.13.03.5.1	BELANJA OPERASI	100.246.950,00	0,00	99.046.950,00	99.046.950,00	(1.200.000,00)	98,80
4.01.01.2.13.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.2.13.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.246.950,00	0,00	99.046.950,00	99.046.950,00	(1.200.000,00)	98,80
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	161.256.150,00	0,00	157.500.150,00	157.500.150,00	(3.756.000,00)	97,67
4.01.01.2.13.04.5.1	BELANJA OPERASI	161.256.150,00	0,00	157.500.150,00	157.500.150,00	(3.756.000,00)	97,67
4.01.01.2.13.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.256.150,00	0,00	157.500.150,00	157.500.150,00	(3.756.000,00)	97,67
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	70.826.450,00	0,00	70.826.450,00	70.826.450,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.01.2.13.05.5.1	BELANJA OPERASI	70.826.450,00	0,00	70.826.450,00	70.826.450,00	0,00	100,00
4.01.01.2.13.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.826.450,00	0,00	70.826.450,00	70.826.450,00	0,00	100,00
4.01.01.2.14	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.435.567.544,00	0,00	2.339.860.453,00	2.339.860.453,00	(95.707.091,00)	96,07
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.626.881.128,00	0,00	1.554.059.709,00	1.554.059.709,00	(72.821.419,00)	95,52
4.01.01.2.14.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.626.881.128,00	0,00	1.554.059.709,00	1.554.059.709,00	(72.821.419,00)	95,52
4.01.01.2.14.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.626.881.128,00	0,00	1.554.059.709,00	1.554.059.709,00	(72.821.419,00)	95,52
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	369.315.690,00	0,00	352.738.936,00	352.738.936,00	(16.576.754,00)	95,51
4.01.01.2.14.02.5.1	BELANJA OPERASI	369.315.690,00	0,00	352.738.936,00	352.738.936,00	(16.576.754,00)	95,51
4.01.01.2.14.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.315.690,00	0,00	352.738.936,00	352.738.936,00	(16.576.754,00)	95,51
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	439.370.726,00	0,00	433.061.808,00	433.061.808,00	(6.308.918,00)	98,56
4.01.01.2.14.03.5.1	BELANJA OPERASI	439.370.726,00	0,00	433.061.808,00	433.061.808,00	(6.308.918,00)	98,56
4.01.01.2.14.03.5.1.01	Belanja Pegawai	700.000,00	0,00	0,00	0,00	(700.000,00)	0,00
4.01.01.2.14.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.670.726,00	0,00	433.061.808,00	433.061.808,00	(5.608.918,00)	98,72
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	33.068.816.906,00	0,00	30.950.682.140,00	30.950.682.140,00	(2.118.134.766,00)	93,59
4.01.02.2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	2.439.603.142,00	0,00	2.378.511.222,00	2.378.511.222,00	(61.091.920,00)	97,50
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.299.075.606,00	0,00	1.292.367.883,00	1.292.367.883,00	(6.707.723,00)	99,48
4.01.02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.299.075.606,00	0,00	1.292.367.883,00	1.292.367.883,00	(6.707.723,00)	99,48
4.01.02.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.075.606,00	0,00	1.292.367.883,00	1.292.367.883,00	(6.707.723,00)	99,48
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	722.782.918,00	0,00	697.783.320,00	697.783.320,00	(24.999.598,00)	96,54
4.01.02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	722.782.918,00	0,00	697.783.320,00	697.783.320,00	(24.999.598,00)	96,54
4.01.02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.782.918,00	0,00	697.783.320,00	697.783.320,00	(24.999.598,00)	96,54
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	417.744.618,00	0,00	388.360.019,00	388.360.019,00	(29.384.599,00)	92,97
4.01.02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	417.744.618,00	0,00	388.360.019,00	388.360.019,00	(29.384.599,00)	92,97
4.01.02.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00
4.01.02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.344.618,00	0,00	388.360.019,00	388.360.019,00	(26.984.599,00)	93,50
4.01.02.2.02	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.052.215.428,00	0,00	27.074.652.220,00	27.074.652.220,00	(1.977.563.208,00)	93,19
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16.610.686.460,00	0,00	14.744.772.744,00	14.744.772.744,00	(1.865.913.716,00)	88,77
4.01.02.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	16.610.686.460,00	0,00	14.744.772.744,00	14.744.772.744,00	(1.865.913.716,00)	88,77
4.01.02.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.260.686.460,00	0,00	9.914.772.744,00	9.914.772.744,00	(1.345.913.716,00)	88,05
4.01.02.2.02.01.5.1.05	Belanja Hibah	5.350.000.000,00	0,00	4.830.000.000,00	4.830.000.000,00	(520.000.000,00)	90,28
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	10.626.708.618,00	0,00	10.575.127.226,00	10.575.127.226,00	(51.581.392,00)	99,51

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.02.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	10.626.708.618,00	0,00	10.575.127.226,00	10.575.127.226,00	(51.581.392,00)	99,51
4.01.02.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00
4.01.02.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.308.618,00	0,00	475.127.226,00	475.127.226,00	(46.181.392,00)	91,14
4.01.02.2.02.02.5.1.05	Belanja Hibah	10.100.000.000,00	0,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	0,00	100,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.814.820.350,00	0,00	1.754.752.250,00	1.754.752.250,00	(60.068.100,00)	96,69
4.01.02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.814.820.350,00	0,00	1.754.752.250,00	1.754.752.250,00	(60.068.100,00)	96,69
4.01.02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.814.820.350,00	0,00	1.754.752.250,00	1.754.752.250,00	(60.068.100,00)	96,69
4.01.02.2.03	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.346.156.086,00	0,00	1.311.207.668,00	1.311.207.668,00	(34.948.418,00)	97,40
4.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	698.008.868,00	0,00	670.227.646,00	670.227.646,00	(27.781.222,00)	96,02
4.01.02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	698.008.868,00	0,00	670.227.646,00	670.227.646,00	(27.781.222,00)	96,02
4.01.02.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	698.008.868,00	0,00	670.227.646,00	670.227.646,00	(27.781.222,00)	96,02
4.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	360.282.950,00	0,00	358.671.600,00	358.671.600,00	(1.611.350,00)	99,55
4.01.02.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	360.282.950,00	0,00	358.671.600,00	358.671.600,00	(1.611.350,00)	99,55
4.01.02.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.282.950,00	0,00	358.671.600,00	358.671.600,00	(1.611.350,00)	99,55
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	287.864.268,00	0,00	282.308.422,00	282.308.422,00	(5.555.846,00)	98,07
4.01.02.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	287.864.268,00	0,00	282.308.422,00	282.308.422,00	(5.555.846,00)	98,07
4.01.02.2.03.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.864.268,00	0,00	282.308.422,00	282.308.422,00	(5.555.846,00)	98,07
4.01.02.2.04	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	230.842.250,00	0,00	186.311.030,00	186.311.030,00	(44.531.220,00)	80,71
4.01.02.2.04.01	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	169.829.350,00	0,00	142.522.630,00	142.522.630,00	(27.306.720,00)	83,92
4.01.02.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	169.829.350,00	0,00	142.522.630,00	142.522.630,00	(27.306.720,00)	83,92
4.01.02.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.829.350,00	0,00	142.522.630,00	142.522.630,00	(27.306.720,00)	83,92
4.01.02.2.04.02	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	61.012.900,00	0,00	43.788.400,00	43.788.400,00	(17.224.500,00)	71,77
4.01.02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	61.012.900,00	0,00	43.788.400,00	43.788.400,00	(17.224.500,00)	71,77
4.01.02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.012.900,00	0,00	43.788.400,00	43.788.400,00	(17.224.500,00)	71,77
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	13.323.396.840,00	0,00	12.704.676.999,00	12.704.676.999,00	(618.719.841,00)	95,36
4.01.03.2.01	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	1.501.032.475,00	0,00	1.326.728.143,00	1.326.728.143,00	(174.304.332,00)	88,39
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	650.876.050,00	0,00	637.350.950,00	637.350.950,00	(13.525.100,00)	97,92
4.01.03.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	650.876.050,00	0,00	637.350.950,00	637.350.950,00	(13.525.100,00)	97,92

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.03.2.01.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.876.050,00	0,00	637.350.950,00	637.350.950,00	(13.525.100,00)	97,92
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	603.766.225,00	0,00	449.639.225,00	449.639.225,00	(154.127.000,00)	74,47
4.01.03.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	603.766.225,00	0,00	449.639.225,00	449.639.225,00	(154.127.000,00)	74,47
4.01.03.2.01.02.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.766.225,00	0,00	449.639.225,00	449.639.225,00	(154.127.000,00)	74,47
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	246.390.200,00	0,00	239.737.968,00	239.737.968,00	(6.652.232,00)	97,30
4.01.03.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	246.390.200,00	0,00	239.737.968,00	239.737.968,00	(6.652.232,00)	97,30
4.01.03.2.01.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.390.200,00	0,00	239.737.968,00	239.737.968,00	(6.652.232,00)	97,30
4.01.03.2.02	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.497.090.258,00	0,00	3.306.780.514,00	3.306.780.514,00	(190.309.744,00)	94,56
4.01.03.2.02.01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	1.263.929.522,00	0,00	1.167.910.040,00	1.167.910.040,00	(96.019.482,00)	92,40
4.01.03.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	1.263.929.522,00	0,00	1.167.910.040,00	1.167.910.040,00	(96.019.482,00)	92,40
4.01.03.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.929.522,00	0,00	1.167.910.040,00	1.167.910.040,00	(96.019.482,00)	92,40
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	672.156.050,00	0,00	652.849.953,00	652.849.953,00	(19.306.097,00)	97,13
4.01.03.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	672.156.050,00	0,00	652.849.953,00	652.849.953,00	(19.306.097,00)	97,13
4.01.03.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.02.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.156.050,00	0,00	652.849.953,00	652.849.953,00	(19.306.097,00)	97,13
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1.561.004.686,00	0,00	1.486.020.521,00	1.486.020.521,00	(74.984.165,00)	95,20
4.01.03.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.561.004.686,00	0,00	1.486.020.521,00	1.486.020.521,00	(74.984.165,00)	95,20
4.01.03.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.561.004.686,00	0,00	1.486.020.521,00	1.486.020.521,00	(74.984.165,00)	95,20
4.01.03.2.03	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.826.760.057,00	0,00	7.581.290.146,00	7.581.290.146,00	(245.469.911,00)	96,86
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.801.261.324,00	0,00	4.677.487.554,00	4.677.487.554,00	(123.773.770,00)	97,42
4.01.03.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.801.261.324,00	0,00	4.677.487.554,00	4.677.487.554,00	(123.773.770,00)	97,42
4.01.03.2.03.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.728.150.000,00	0,00	3.635.640.000,00	3.635.640.000,00	(92.510.000,00)	97,52
4.01.03.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.073.111.324,00	0,00	1.041.847.554,00	1.041.847.554,00	(31.263.770,00)	97,09
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	551.763.808,00	0,00	495.090.507,00	495.090.507,00	(56.673.301,00)	89,73
4.01.03.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	551.763.808,00	0,00	495.090.507,00	495.090.507,00	(56.673.301,00)	89,73
4.01.03.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.763.808,00	0,00	495.090.507,00	495.090.507,00	(56.673.301,00)	89,73
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.473.734.925,00	0,00	2.408.712.085,00	2.408.712.085,00	(65.022.840,00)	97,37
4.01.03.2.03.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.473.734.925,00	0,00	2.408.712.085,00	2.408.712.085,00	(65.022.840,00)	97,37
4.01.03.2.03.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.473.734.925,00	0,00	2.408.712.085,00	2.408.712.085,00	(65.022.840,00)	97,37
4.01.03.2.04	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	498.514.050,00	0,00	489.878.196,00	489.878.196,00	(8.635.854,00)	98,27

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	248.749.400,00	0,00	245.962.900,00	245.962.900,00	(2.786.500,00)	98,88
4.01.03.2.04.01.5.1	BELANJA OPERASI	248.749.400,00	0,00	245.962.900,00	245.962.900,00	(2.786.500,00)	98,88
4.01.03.2.04.01.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.749.400,00	0,00	245.962.900,00	245.962.900,00	(2.786.500,00)	98,88
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	128.688.300,00	0,00	127.354.498,00	127.354.498,00	(1.333.802,00)	98,96
4.01.03.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	128.688.300,00	0,00	127.354.498,00	127.354.498,00	(1.333.802,00)	98,96
4.01.03.2.04.02.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.688.300,00	0,00	127.354.498,00	127.354.498,00	(1.333.802,00)	98,96
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	121.076.350,00	0,00	116.560.798,00	116.560.798,00	(4.515.552,00)	96,27
4.01.03.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	121.076.350,00	0,00	116.560.798,00	116.560.798,00	(4.515.552,00)	96,27
4.01.03.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.076.350,00	0,00	116.560.798,00	116.560.798,00	(4.515.552,00)	96,27
	JUMLAH BELANJA DAERAH	150.910.547.513,00	0,00	141.096.374.066,00	141.096.374.066,00	(9.814.173.447,00)	93,50
	SURPLUS / (DEFISIT)	(150.910.547.513,00)	0,00	(141.096.374.066,00)	(141.096.374.066,00)	9.814.173.447,00	93,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(150.910.547.513,00)	0,00	(141.096.374.066,00)	(141.096.374.066,00)	9.814.173.447,00	93,50

Cibinong, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

Drs. BURHANUDIN, M.Si
NIP.196404181985031015

**REKAPITULASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022**

NO	UNIT KERJA	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	89,16	SANGAT BAIK
2	INSPEKTORAT	99,09	SANGAT BAIK
3	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	79,01	BAIK
4	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	81,35	BAIK
5	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	82,49	BAIK
6	DINAS SOSIAL	87,02	BAIK
7	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	81,01	BAIK
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	84,59	BAIK
9	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	76,81	BAIK
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	76,94	BAIK
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80,78	BAIK
12	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	79,06	BAIK
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	83,77	BAIK
14	DINAS TENAGA KERJA	87,89	BAIK
15	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	85,33	BAIK
16	DINAS KESEHATAN	80,51	BAIK
17	DINAS PENDIDIKAN	81,11	BAIK
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	82,06	BAIK
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	77,78	BAIK
20	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	84,43	BAIK
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80,00	BAIK
22	DINAS PERHUBUNGAN	80,04	BAIK
23	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	84,22	BAIK
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	88,30	BAIK

NO	UNIT KERJA	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	2	3	4
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	79,43	BAIK
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	82,14	BAIK
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	78,23	BAIK
28	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	81,18	BAIK
29	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	80,69	BAIK
30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	79,77	BAIK
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	81,28	BAIK
32	KECAMATAN CIBUNGBULANG	82,64	BAIK
33	KECAMATAN RANCABUNGUR	82,25	BAIK
34	KECAMATAN MEGAMENDUNG	82,33	BAIK
35	KECAMATAN CIAWI	79,96	BAIK
36	KECAMATAN TAMANSARI	86,62	BAIK
37	KECAMATAN CARINGIN	80,64	BAIK
38	KECAMATAN CARIU	82,11	BAIK
39	KECAMATAN CIGOMBONG	81,72	BAIK
40	KECAMATAN BOJONGGEDE	81,36	BAIK
41	KECAMATAN CIAMPEA	86,01	BAIK
42	KECAMATAN LEUWI SADENG	90,70	SANGAT BAIK
43	KECAMATAN PAMIJAHAN	84,05	BAIK
44	KECAMATAN DRAMAGA	81,91	BAIK
45	KECAMATAN GUNUNG PUTRI	91,13	SANGAT BAIK
46	KECAMATAN SUKAMAKMUR	83,74	BAIK
47	KECAMATAN CIJERUK	84,12	BAIK
48	KECAMATAN KLAPANUNGGAL	81,34	BAIK
49	KECAMATAN NANGGUNG	82,2	BAIK
50	KECAMATAN TENJOLAYA	88,52	BAIK

NO	UNIT KERJA	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	2	3	4
51	KECAMATAN CISARUA	93,64	SANGAT BAIK
52	KECAMATAN JONGGOL	80,14	BAIK
53	KECAMATAN CISEENG	89,69	SANGAT BAIK
54	KECAMATAN BABAKAN MADANG	81,99	BAIK
55	KECAMATAN CIBINONG	80,70	BAIK
56	KECAMATAN CIOMAS	82,73	BAIK
57	KECAMATAN CIGUDEG	77,06	BAIK
58	KECAMATAN CITEUREUP	79,25	BAIK
59	KECAMATAN KEMANG	83,89	BAIK
60	KECAMATAN RUMPIN	82,97	BAIK
61	KECAMATAN TAJURHALANG	82,03	BAIK
62	KECAMATAN SUKARAJA	79,95	BAIK
63	KECAMATAN PARUNG	76,61	BAIK
64	KECAMATAN CILEUNGI	83,53	BAIK
65	KECAMATAN TENJO	73,93	KURANG BAIK
66	KECAMATAN PARUNG PANJANG	86,69	BAIK
67	KECAMATAN TANJUNGSARI	76,70	BAIK
68	KECAMATAN SUKAJAYA	77,03	BAIK
69	KECAMATAN LEUWILIANG	86,53	BAIK
70	KECAMATAN JASINGA	88,30	BAIK
71	KECAMATAN GUNUNGSINDUR	0	TIDAK BAIK
72	RSUD CIAWI	80,43	BAIK
73	RSUD CIBINONG	83,31	BAIK
74	RSUD LEUWILIANG	79,81	BAIK
75	RSUD CILEUNGI	84,21	BAIK

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERANGKAT DAERAH BERKRITERIA BAIK SEBESAR 97.33 %



BUPATI BOGOR

Cibinong, 21 Maret 2022

Nomor : 131 / 848 - Adbang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Penyampaian Dokumen
LKPJ Bupati Bogor TA 2021

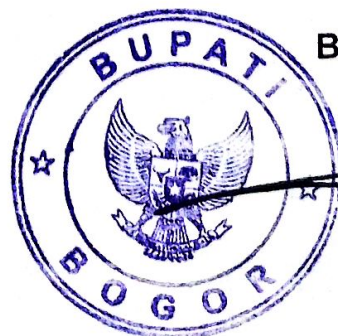
Kepada :
Yth. **Ketua DPRD**
Kabupaten Bogor

di -
Cibinong

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, dengan ini disampaikan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas lebih lanjut sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI BOGOR,

ADE YASIN